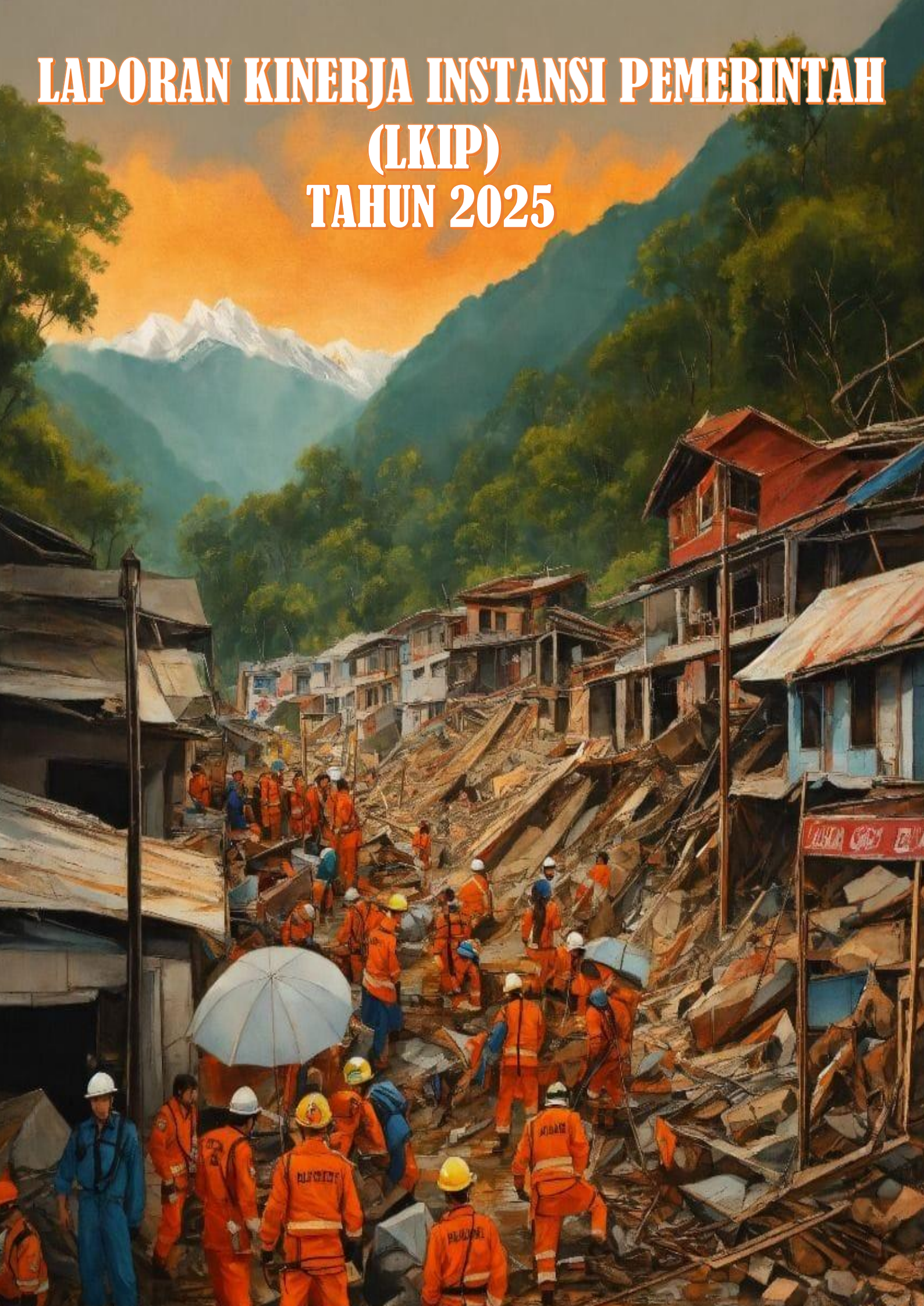


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dapat diselesaikan dengan tepat waktu. LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi selama tahun 2024 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang telah berhasil tercapai maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LKIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dan analisis capaiannya selama tahun 2024 beserta strategi yang digunakan oleh BPBD Kota Bekasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah berhasil dicapai dengan baik.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2024. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi secara keseluruhan dan mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bekasi, 19 Januari 2026

**Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI,**



IMAN SETIA GUNAWAN, S.T., M.T

Penata Tk. I / III.d

NIP. 19761014 200604 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat	2
1.3. Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi	2
1.4. Struktur Organisasi	3
1.5. Sumber Daya	5
1.6. Aspek Strategis	6
1.7. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	7
1.8. Sistematika Laporan Kinerja	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	12
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.2. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.2.	Permasalahan yang Dihadapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.....	7
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi	12
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi	14
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	15
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029	16
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025	17
Tabel 2.6.	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Perubahan Tahun 2025	18
Tabel 2.7.	Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025	18
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	21
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 3.3.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025	23
Tabel 3.4.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025	24
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Bekasi.....	26
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja “Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi”	26
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025	27
Tabel 3.8.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun ini	28
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2025	30
Tabel 3.10.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	30
Tabel 3.11.	Capaian Indikator Per Sub Kegiatan	34

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025	36
Tabel 3.13. Efisiensi Anggaran Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1.	Diagram Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Daerah	27
Gambar 3.2.	Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB.....	29
Gambar 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Standar Kota di Jawa Barat	32
Gambar 3.4.	Indikator Penilaian Indeks Ketahanan Daerah.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi berfungsi sebagai lembaga yang mengatur kebijakan dan program untuk menangani bencana di wilayah Kota Bekasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi memiliki peranan penting dalam mengurangi risiko bencana, merespons situasi darurat, dan melakukan pemulihan setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, BPBD Kota Bekasi terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan juga memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memberikan hasil yang baik dan berkelanjutan.

Tahun 2025 menjadi titik penting bagi BPBD Kota Bekasi dalam merealisasikan visi dan misi kota yang lebih siap menghadapi bencana. Hal ini terutama penting karena tantangan baru muncul akibat perubahan iklim dan pertumbuhan populasi yang cepat. Melalui LKIP ini, BPBD Kota Bekasi akan menjelaskan capaian kinerja tahun 2025, mencakup kesiapan, penanganan bencana, dan pemulihan setelah bencana. Laporan ini diharapkan mampu memberikan Gambaran yang jelas tentang seberapa efektif dan efisien program yang telah dijalankan, serta menjadi dasar untuk merencanakan program yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam Menyusun LKIP ini diharapkan dapat membantu BPBD Kota Bekasi dalam meningkatkan kemampuannya, memberikan hasil yang lebih baik dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga, serta terus berusaha memperkuat sistem penanganan bencana bencana di Kota Bekasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berupaya untuk selalu meningkatkan kinerjanya melalui Langkah-langkah strategis sebagai landasan bagi terwujudnya Upaya penanggulangan yang efektif dan efisien. Hal tersebut dilaksanakan antara lain melalui :

- a. Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007;
- b. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
- c. Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
- d. Sebagai Lembaga yang relative baru, BPBD dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai pencapaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Tujuan utama dari penyusunan LKIP tersebut adalah untuk menunjukkan sampai sejauh mana sasaran dan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada tahun 2025 telah tercapai. Menggambarkan usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi penggunaan anggaran, dan juga melakukan evaluasi guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa mendatang.

1.3 TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Terletak di Jl. Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan setandarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diangkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atas dasar tersebut terbitlah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sehingga terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana di wilayah Kota Bekasi. BPBD Kota Bekasi berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh, meliputi

tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, guna melindungi Masyarakat serta meminimalkan risiko bencana.

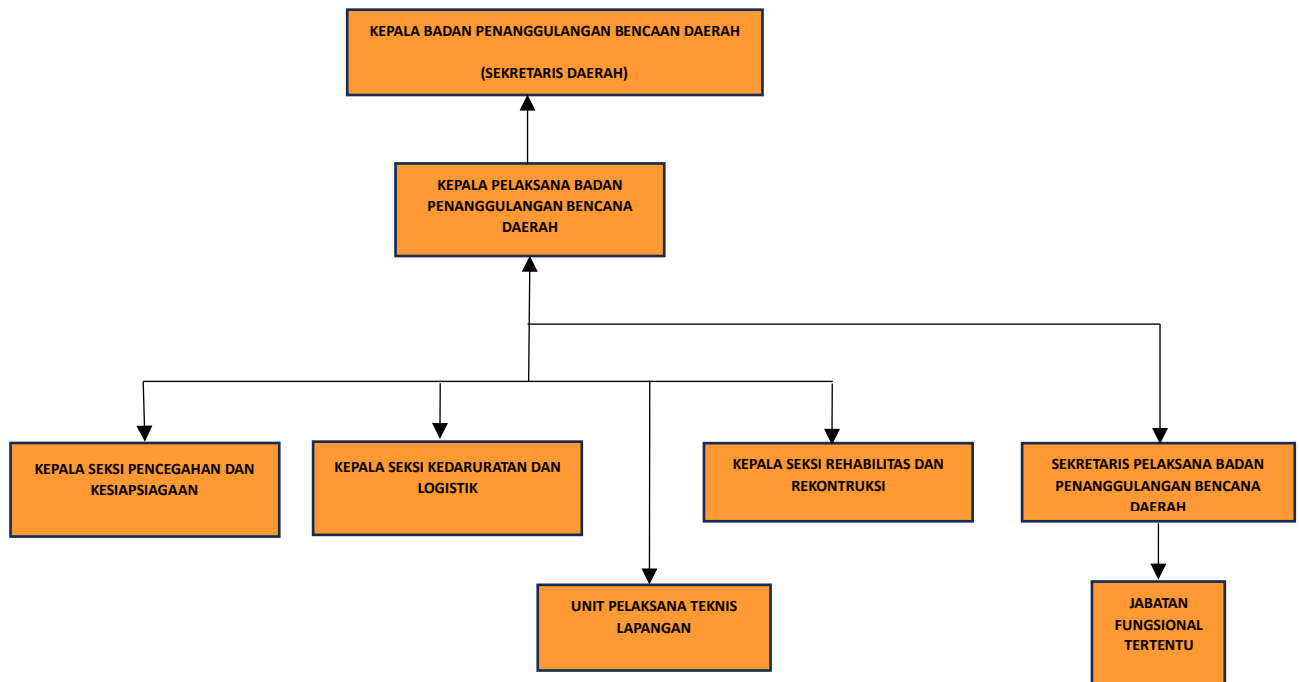
BPBD Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah. Kepala BPBD bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kebijakan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat memiliki fungsi penyelenggaraan administrasi dan pelayanan teknis, yang meliputi perencanaan program dan anggaran, keuangan, kepegawaian, umum, serta penyusunan laporan dan evaluasi kinerja BPBD Kota Bekasi.

Selanjutnya, struktur organisasi BPBD terdiri atas beberapa bidang teknis, antara lain :

1. **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, yang bertugas menyusun dan melaksanakan Upaya mitigasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, sosialisasi, pelatihan, serta perencanaan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.
2. **Bidang Kedaruratan dan Logistik**, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana, termasuk operasi penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar korban, pengelolaan logistik dan peralatan, serta koordinasi lintas sektor saat terjadi bencana.
3. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, yang melaksanakan kegiatan pemulihan pasca bencana, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi, guna memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur Masyarakat terdampak.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



1.5 SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Rincian secara lengkap SDM Perangkat Daerah yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

a. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1
Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

JENIS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JML
PNS	4	5				3			12
PPPK		11				28	2	1	42
PPPK PARUH WAKTU		2	2			23			27
PHL		2	1			2			5
JUMLAH	4	20	3			56	2	1	86

Melihat tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang begitu banyak tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Dikarenakan kekurangan

SDM khususnya pada jabatan fungsional/kategori keterampilan, maka dibutuhkan penambahan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi yang mempunyai kredibilitas dalam management penanggulangan bencana serta pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana baik dari segi kualitas dan kuantitas.

1.6 ASPEK STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Bekasi dalam mengelola penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Adanya perubahan dalam dinamika kehidupan masyarakat yang semakin pintar dan kritis, serta meningkatnya tuntutan terhadap instansi pemerintah dan layanan publik, menjadi konsekuensi dan tantangan yang perlu dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa cara pengelolaan organisasi BPBD Kota Bekasi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana harus bertransformasi. Perubahan tersebut perlu mengikuti perkembangan paradigma penanggulangan bencana yang beralih dari pendekatan yang hanya responsive kearah pencegahan pencegahan, dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kota Bekasi memiliki peran penting dalam mengatasi bencana di Kota Bekasi, dengan harapan dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, yang merupakan salah satu potensi Pembangunan, BPBD berfungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana di Kota Bekasi, BPBD lebih banyak berfokus pada kegiatan eksternal dari pada internal, terutama berperan sebagai koordinator penanggulangan bencana antara instansi pemerintah dan maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Permasalahan lain yang terdapat dalam RPD Kota Bekasi menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu factor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perintahan dalam tiga tahun kedepan, rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi antara lain :

Tabel 1.2
Permasalahan yang di hadapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bekasi

MASALAH	PERMASALAH	AKAR MASALAH
1. Masih belum optimalnya upaya dalam penanggulangan bencana	1. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung penyelenggaraan pelayanan kebencanaan. 2. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. belum semua petugas memiliki kapasitas yang mumpuni dalam darurat bencana
	2. Permasalahan Kelembagaan	1. Tersedinya dokumen kebencanaan (KRB, RPB, dan Renkon) di tingkat Kota hingga tingkat Kelurahan namun belum di tetapkan menjadi Peraturan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota. 2. Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait rawan bencana belum maksimal. 3. Masih belum optimalnya koordinasi pengurangan risiko bencana dan alokasi anggaran yang terbatas; 4. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan maupun pembangunan infrastruktur mitigasi bencana 5. Belum optimalnya peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan 6. Belum terbangunnya sistem data dan informasi yang terkoneksi pada system informasi penanggulangan bencana 7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum optimal karena Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh eselon III yang dimana seharusnya Kepala Pelaksana di jabat oleh II.

1.7 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi menjalankan upaya penanggulangan bencana melalui tiga tahapan utama yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

1. Kegiatan Pra Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melakukan berbagai upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Kegiatan ini meliputi penyusunan rencana penanggulangan bencana, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kebencanaan terhadap Masyarakat seperti kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana, dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten guna meningkatkan kapasitas aparatur dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana.

2. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana

Pada kegiatan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berperan sebagai koordinator pelaksanaan penanganan darurat. BPBD melakukan kaji cepat terhadap dampak bencana, mengoordinasikan upaya penyelamatan dan evakuasi korban, serta menyalurkan bantuan logistic dan peralatan darurat. Dalam kegiatan ini BPBD bekerja sama dengan TNI, Polri, Perangkat Daerah terkait, relawan dan Masyarakat untuk memastikan penanganan bencana.

3. Kegiatan Pasca Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai upaya pemulihan kondisi Masyarakat dan wilayah yang terdampak. Kegiatan ini mencakup penanganan pohon tumbang yang mengganggu akses umum, assessment rumah tidak layak huni akibat bencana (angin dan hujan) assessment tanah longsor bantaran kali dan membuat nota dinas laporan kepada Wali Kota terkait penanganan assessment rumah tidak layak huni.

Melalui pelaksanaan ketiga tahapan diatas, BPBD Kota Bekasi berkomitmen untuk meningkatkan ketangguhan daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan Masyarakat.

1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi yang dimulai dari latar belakang; tujuan dan manfaat; tugas, fungsi dan wewenang; struktur organisasi; sumber daya; aspek strategis dan isu strategis; kegiatan dan layanan produk organisasi; dan sistematika laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sub ini menyajikan infografis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) penting untuk menggabungkan antara keahlian manusia dan sumber daya lainnya dalam perencanaan strategis. Hal ini diperlukan agar instansi dapat menghadapi kemajuan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik dari internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Penilaian terhadap elemen-elemen tersebut sangat penting dan menjadi landasan untuk mewujudkan visi dan misi, serta strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dalam bab ini akan dijelaskan lebih detail mengenai Rencana Strategis serta rencana dan tagret kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk tahun 2025.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka menengah yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Renstra berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan dan kegiatan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam Renstra BPBD Kota Bekasi, RPD 2024-2026 dijadikan sebagai acuan utama dalam penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan program perangkat daerah. Seluruh program dan kegiatan BPBD diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD, khususnya dalam mewujudkan ketangguhan daerah terhadap bencana serta perlindungan masyarakat dari risiko bencana.

Demi mewujudkan Kota Bekasi dalam menanggulangi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 ini didasarkan kepada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang

panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, lokal, nasional, dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dalam Renstra menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebafei penjabaran visi dan misi organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang suatu keberhasilan. Dengan adanya pernyataan mengenai tujuan yang ditetapkan maka akan jelas bagi suatu organisasi terkait arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, sasaran merupakan penjabaran spesifik dari tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Sasaran berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit mengenai hasil yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan sasaran yang tepat akan membantu organisasi dalam mengarahkan berbagai program dan kegiatan agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk dedikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk mendukung tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mencakup tujuan dan sasaran seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Bekasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja tahun ke		
					2024	2025	2026
1	Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan	Jumlah warga yang dapat pengetahuan tentang bencana			689.890 jiwa	780.976 jiwa	895.876 jiwa

			Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi	Jumlah Warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
				Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
				Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan BPBD yang Akuntabel dan Profesional	Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi	75.80	75.80	75.80

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas dikarenakan adanya penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 maka tujuan dan sasaran BPBD Kota Bekasi terjadi penyesuaian terhadap struktur tujuan, sasaran, serta indikator kinerja agar lebih selaras dengan arah pembangunan daerah. Perubahan tujuan dan sasaran BPBD Kota Bekasi seperti dibawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Bekasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.05.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana (Nilai)	111,58	111	110,5	110	109,5	109	108,5	
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	-	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	

Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi 2025 – 2029

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Bekasi tahun 2025 dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan target kinerja dengan kebijakan baru, hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta efisiensi anggaran.

Perubahan IKU menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan reaktif menjadi preventif dan strategis. Jika sebelumnya fokus pada penanganan bencana setelah terjadi, maka pada tahun 2025 lebih menekankan pada pengurangan risiko bencana. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja BPBD Kota Bekasi dalam mengurangi risiko bencana serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permen Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Berikut ini Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
Tahun 2024 – 2026

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana/Jumlah Warga Negara yang Tinggal di Kawasan Rawan Bencana x 100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mendapatkan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/Jumlah Warga Negara yang Tinggal di Kawasan Rawan Bencana x 100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana/Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana x 100%
2	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi	Nilai	75,80	75,80	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) perencanaan kinerja (bobot 30%), (2) pengukuran kinerja (bobot 30%), (3) pelaporan kinerja (bobot 15%), dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%). Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat :

						AA (nilai >90-100), A (nilai >80-90), BB (nilai >70-80), B (nilai >60-70), CC (nilai >50-60), C (nilai >30-50), dan D (nilai 0-30).
--	--	--	--	--	--	---

Sumber : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024-2026

Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 terdapat tiga (3) indikator dari sasaran “Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi” diantaranya jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana. Selain itu untuk sasaran “meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien” hanya terdapat satu indikator yaitu nilai AKIP BPBD Kota Bekasi.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	KET	FORMULASI PERHITUNGAN
				2025		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(11)	
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	-	0,6		(Jumlah Skor / Jumlah Indikator) x 100%

Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi 2025-2029

Dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 bahwa hanya mencakup satu (1) indikator yaitu Indeks Ketahanan Daerah. Terdapat perbedaan antara IKU RPD dengan IKU RPJMD karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah ingin menunjang nilai indeks risiko bencana yang terdapat pada IKU Kota Bekasi. Maka untuk dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mengambil Indikator Ketahanan Daerah (IKD) sebagai Indikator Kinerja Utama supaya output dari rencana program dan kegiatan BPBD dapat mempengaruhi nilai IKD sehingga nilai Indeks Risiko Bencana menjadi kecil.

Hal tersebut dikarenakan Indeks Risiko Bencana (IRB) itu dasarnya mengukur seberapa besar potensi kerugian akibat bencana, bukan seberapa sering bencananya terjadi. Maka semakin kecil nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana masih rendah, baik dari aspek pencegahan, kesiapsiagaan, kapasitas kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya potensi kerugian apabila bencana terjadi. Oleh karena itu, rendahnya indeks ketahanan daerah akan berbanding terbalik dengan indeks risiko bencana, dimana risiko bencana menjadi semakin besar.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan bertahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi seperti dibawah ini:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

		Jumlah warga yang memperoleh layanan dan penyelamatan dan evakuasi bencana	100%	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
2	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar lebih efektifitas dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD Kota Bekasi	75,80%	Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel perjanjian kinerja diatas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan dengan perjanjian kinerja perubahan 2025, pada awal pembentukan perjanjian kinerja 2025 masih terdapat dua (2) sasaran strategis dengan empat (4) indikator kinerja. Sedangkan untuk perjanjian kinerja perubahan terdapat perbedaan hanya memiliki satu (1) sasaran strategi dan satu (1) indikator kinerja. Hal tersebut terdapat perubahan karena dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian arah kebijakan dna sasaran pembangunan daerah sesuai dengan pedoman baru yaitu dari RPD menuju RPJMD. Perubahan ini merupakan konseskuensi dari adanya peralihan pedoman perencanaan, sehingga indikator dan sasaran kinerja diselaraskan dengan RPJMD terbaru. Maka dapat dilihat dari perubahan tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0.60	Kepala Pelaksana BPBD

Sumber: Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi didukung alokasi anggaran Tahun 2025 yang secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7

Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATA/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
I	Porgram Penanggulangan Bencana	5.174.156.120	APBD Kota Bekasi
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	537.386.600	APBD Kota Bekasi

1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	316.676.000	APBD Kota Bekasi
2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	220.710.600	APBD Kota Bekasi
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.220.236.520	APBD Kota Bekasi
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	221.882.000	APBD Kota Bekasi
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3.447.067.520	APBD Kota Bekasi
3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	291.172.000	APBD Kota Bekasi
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	APBD Kota Bekasi
5	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	230.115.000	APBD Kota Bekasi
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	291.533.000	APBD Kota Bekasi
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.133.000	APBD Kota Bekasi
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	265.400.000	APBD Kota Bekasi
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	125.000.000	APBD Kota Bekasi
1	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	125.000.000	APBD Kota Bekasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.717.843.076	APBD Kota Bekasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.905.000	APBD Kota Bekasi
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.400.000	APBD Kota Bekasi
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.505.000	APBD Kota Bekasi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.791.642.000	APBD Kota Bekasi
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.100.000	APBD Kota Bekasi
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.786.542.000	APBD Kota Bekasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.959.700	APBD Kota Bekasi
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.545.000	APBD Kota Bekasi
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.730.200	APBD Kota Bekasi
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	55.920.000	APBD Kota Bekasi
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.624.500	APBD Kota Bekasi
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.140.000	APBD Kota Bekasi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.662.356	APBD Kota Bekasi
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.600.000	APBD Kota Bekasi
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.062.356	APBD Kota Bekasi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.852.300	APBD Kota Bekasi

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.500.000	APBD Kota Bekasi
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.800.000	APBD Kota Bekasi
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.552.300	APBD Kota Bekasi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.029.000	APBD Kota Bekasi
1	Pengadaan Mebel	55.029.000	APBD Kota Bekasi
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.792.720	APBD Kota Bekasi
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	253.792.720	APBD Kota Bekasi
Total Pagu		Rp. 11.891.999.196	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengurusan capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian kinerja yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Bekasi tahun 2024 – 2026 serta Perjanjian Kinerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak dua (2) Sasaran Strategis dan empat (4) Indikator Kinerja. Dibawah ini merupakan capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2024 :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	100%	100%	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
		Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar lebih efektifitas dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPBD Kota Bekasi	75.80%	60.10%	79.28%

Sumber : Bagian Sekretarian BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi memiliki dua (2) Sasaran Strategis yang harus di capai dalam setiap tahunnya sebesar

100% yaitu “Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi” dan “Meningkatkan kualitas dan keefektifitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien”

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) melibatkan pengamatan berbagai matriks yang telah ditentukan untuk menilai kinerja suatu organisasi atau program. Proses evaluasi IKU ini sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh organisasi atau program berhasil mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Disamping itu, evaluasi ini juga dapat membantu menemukan bidang yang dapat membantu menemukan bidang yang perlu perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Berikut ini adalah evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi :

3.1.1 Sasaran I

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi

Sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi mempunyai tiga (3) indikator kinerja yaitu jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana.

3.1.1.1 Indikator Pertama : Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana digunakan untuk mengukur tingkat jangkauan layanan BPBD dalam memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat khususnya terkait potensi ancaman bencana dan upaya pengurangan risiko bencana. Indikator ini mencerminkan peran BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana di wilayah rawan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, target jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ditetapkan sebesar 100, dan realisasi kinerja juga mencapai 100, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan layanan informasi kebencanaan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

3.1.1.2 Indikator Kedua : Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2024 sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah warga mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sepanjang tahun 2024 sebanyak 14.311. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan	100%	42,51%	42,51%

	bencana di Kota Bekasi	kesiapsiagaan terhadap bencana (krb, mutugasi, rpb, gladi0)			
--	------------------------	---	--	--	--

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi Tahun 2024 sangat baik karena tingkat capaian kinerja pada indikator jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana target kinerja ditetapkan sebesar 100% namun realisasi yang tercapai hanya 42,51% dengan capaian 42,51%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Terlihat dari sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sampai dengan trwiulan II belum terlaksana, dan dari kegiatan yang sudah terlaksana belum semuanya mencapai 100% realisasi. Hal ini yang mengakibatkan indikator kinerja belum mencapai target yang ditentukan.

3.1.1.3 Indikator Ketiga : Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana

Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2024 sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah 798 orang berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan	100%	100%	100%

	bencana di Kota Bekasi	evakuasi korban bencana			
--	---------------------------	----------------------------	--	--	--

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bekasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 sangat baik karena tingkat capaian kinerja pada indikator jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 100 persen dari perbandingan target 100 persen dengan realisasi 100 persen. Dengan kata lain, semua warga yang membutuhkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terlayani sepenuhnya.

3.1.2 Sasaran II

Sasaran :Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja BPBD

Analisis mengenai akuntabilitas kinerja mencakup hubungan antara hasil kegiatan dengan program dan kebijakan yang ada, yang bertujuan untuk mencapai visi, misi, serta sasaran dan tujuan yang sudah di tentukan dalam rencana strategis.

Dalam analisis ini, penting untuk menjelaskan bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan berkembang secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditentukan. Proses analisis dilakukan dengan memanfaatkan informasi/data yang lengkap dan akurat, dan jika memungkinkan, evaluasi kebijakan juga dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut tepat dan efektif, baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun dari system serta proses pelaksanaannya.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas
Kinerja BPBD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai AKIP BPBD	75.80	60.10	79.28

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja BPBD” didukung oleh indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi”.

3.1.2.1 Indikator Pertama : Nilai AKIP BPBD

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja “Nilai AKIP BPBD Kota Bekasi”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai AKIP BPBD	75.80	60.10	79.28

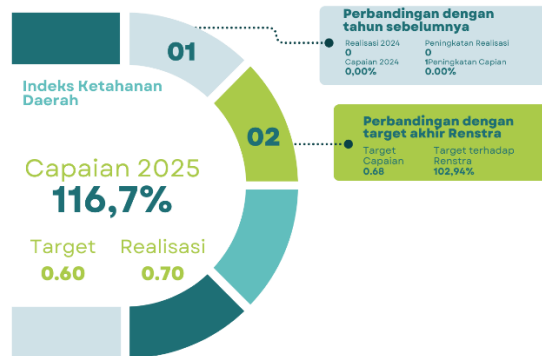
Sumber : Data Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tahun 2024 Realisasi Capaian Indikator Kinerja “Nilai AKIP BPBD” tahun ini memiliki target 75.80 hanya mendapatkan realisasi 60.10 dengan capaian kinerja 79.28, yang artinya belum memenuhi target yang telah ditentukan.

Capaian kinerja yang telah dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi selama tahun 2025 berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 serta Perjanjian Kinerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja.

Sebagai bagian dari penyajian hasil pengukuran kinerja, capaian indicator Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 divisualisasikan melalui diagram berikut untuk menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, serta perkembangan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dan target akhir Renstra, dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Gambar 3.1
Diagram Capaian Kinerja Indeks Ketahan Daerah



Berdasarkan diagram tersebut, capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 0.70 atau 116,7% dari target yang ditetapkan sebesar 0.60. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah berjalan secara efektif sehingga target kinerja dapat terlampaui.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran BPBD Kota Bekasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0.60	0.70	116.7%

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis yang harus dicapai dalam setiap tahunnya yaitu

Indeks Ketahanan Daerah dengan realisasi sebesar 0.70 melampaui target yang ditetapkan sebesar 0.60, dengan tingkat capaian 116.7%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana pada tahun 2025 tergolong sangat baik dan melebihi ekspektasi perencanaan.

Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melibatkan evaluasi terhadap berbagai matrik yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau program. Analisis capaian IKU ini penting untuk memahami sejauh mana organisasi atau program telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, analisis ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Berikut ini adalah analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi :

3.1.3 Sasaran Strategi Pertama : Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana

Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana mempunyai satu (1) indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Daerah. Adapun capaian indikator kinerja diuraikan seperti dibawah ini :

3.1.3.1 Indikator Pertama : Indeks Ketahanan Daerah

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Perbandingan target dan realisasi tahun ini

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.60	0.70	116.7%

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran “Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana” didukung oleh indikator kinerja yaitu “Indeks Ketahanan Daerah” pada tahun 2025 sangat baik. Berdasarkan realisasi indikator yaitu 0.70 dari target 0.60, sehingga tingkat capaian

sebesar 116.7 persen. Hal ini membuktikan bahwa upaya penanggulangan bencana dilakukan dengan baik.

Namun berdasarkan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh BNPB, dari indikator yang dikeluarkan terdapat satu sasaran yang memiliki hasil penilaian rendah yaitu 0.52. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 3.2
Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB

	PRIORITAS	SASARAN		INDIKATOR	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	NILAI RESPON	LEVEL INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI INDIKATOR	INDEKS PRIORITAS	KERANGKA AKSI
1	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	PENINGKATAN KAPASITAS PEMULIHAN	68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	1	2	3	0,06	0,18	0,52	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
2					1	1					
3					0	0					
4					0	0					
5			69	Pemulihan infrastruktur penting	1	2	3	0,05	0,15		Perencanaan Pemulihan Infrastruktur penting Pasca Bencana
6					1	1					
7					0	0					
8					0	0					
9			70	Perbaikan rumah penduduk	1	2	3	0,05	0,15		Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana
0					1	1					
1					0	0					
2					0	0					
3			71	Pemulihan Penghidupan masyarakat	0	1	1	0,04	0,04		Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
4					0	0					
5					0	0					
6					0	0					

Sumber : BNPB

Dapat dilihat dari tabel diatas kecilnya nilai pada aspek *Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana* dalam penilaian BNPB disebabkan oleh rendahnya level indikator (khususnya pemulihan penghidupan masyarakat), keterbatasan bobot nilai, serta belum optimalnya sistem pemulihan yang terstruktur dan terdokumentasi.

Penguatan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi secara kelembagaan dan terintegrasi akan menjadi kunci untuk meningkatkan skor sekaligus memperkuat ketahanan daerah secara berkelanjutan. Nilai yang kecil ini menunjukkan bahwa aspek pemulihan pascabencana masih belum optimal dibandingkan dengan aspek lainnya dalam penilaian BNPB.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0	0	0.00%	0.60	0.70	116.7%

Pada tahun 2025 untuk Indeks Ketahanan Daerah realisasi sebesar 0.70, sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 0.60 dengan capaian 116.7% dan tercapainya Indeks Ketahanan Bencana tercapai karena adanya peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan tingkat resiliensi atau kemampuan daerah untuk bangkit dari ancaman bencana yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana.

Indikator tersebut merupakan indikator BPBD pada tahun 2025-2029, sedangkan pada tahun 2024 belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama BPBD. Hal ini karena pada tahun 2024 indikator kinerja BPBD lebih difokuskan pada indikator yang secara langsung mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, seperti peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, kesiapsiagaan terhadap bencana, informasi bencana, serta penanganan kejadian bencana.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2029	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.70	0.68	102.94%

Sumber : Bagian Sekretariat BPBD Kota Bekasi

Indikator kinerja *Indeks Ketahanan Daerah* pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 0,70, sedangkan target akhir Renstra Tahun 2029 ditetapkan sebesar 0,68. Berdasarkan perhitungan perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan target akhir Renstra, diperoleh capaian sebesar 102,94%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, capaian indikator tersebut telah melampaui target akhir periode perencanaan, meskipun masa Renstra masih berjalan hingga tahun 2029. Dengan demikian, secara kinerja dapat disimpulkan bahwa BPBD telah menunjukkan percepatan dalam pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana”.

Mengingat target akhir Renstra telah tercapai, maka capaian indikator ini akan menjadi evaluasi dan pertimbangan dalam penetapan target kinerja pada tahun-tahun berikutnya, baik melalui penyesuaian target yang lebih optimal maupun penguatan program dan kegiatan guna mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja yang telah diperoleh.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja berdasarkan beberapa kota di Jawa Barat pada indikator Indeks Ketahanan Daerah menggunakan data perbandingan dari perhitungan 71 indikator yang skor hasilnya dapat dilihat dari Open Data Jabar.

Realisasi Kinerja BPBD Kota Bekasi Tahun 2025 dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0.70. Hal ini sudah mendekati standar Nasional Tahun 2025, karena secara nasional target minimal ketahanan daerah yang baik biasanya berada pada kisaran ≥ 75 atau kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan beberapa kota di Jawa Barat, Kota Bekasi mendapatkan nilai cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja
Standar Kota di Jawa Barat

NILAI IKD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN		KETERANGAN
		2024	2025	
1	Bandung	0,68	0,69	⬆️ 0,01
2	Bandung Barat	0,49	0,51	⬆️ 0,02
3	Bekasi	0,65	0,67	⬆️ 0,02
4	Bogor	0,56	0,56	➡️ 0
5	Ciamis	0,69	0,69	➡️ 0
6	Cianjur	0,68	0,74	⬆️ 0,06
7	Cirebon	0,55	0,66	⬆️ 0,11
8	Garut	0,73	0,75	⬆️ 0,02
9	Indramayu	0,8	0,83	⬆️ 0,03
10	Karawang	0,48	0,55	⬆️ 0,07
11	Kota Bandung	0,62	0,63	⬆️ 0,01
12	Kota Banjar	0,58	0,58	➡️ 0
13	Kota Bekasi	0,55	0,7	⬆️ 0,15
14	Kota Bogor	0,76	0,77	⬆️ 0,01
15	Kota Cimahi	0,78	0,78	➡️ 0
16	Kota Cirebon	0,77	0,79	⬆️ 0,02
17	Kota Depok	0,62	0,56	⬇️ -0,06
18	Kota Sukabumi	0,6	0,56	⬇️ -0,04
19	Kota Tasikmalaya	0,52	0,62	⬆️ 0,1
20	Kuningan	0,68	0,67	⬇️ -0,01
21	Majalengka	0,66	0,64	⬇️ -0,02
22	Pangandaran	0,7	0,69	⬇️ -0,01
23	Purwakarta	0,55	0,61	⬆️ 0,06
24	Subang	0,51	0,55	⬆️ 0,04
25	Sukabumi	0,51	0,51	➡️ 0
26	Sumedang	0,48	0,53	⬆️ 0,05
27	Tasikmalaya	0,64	0,64	➡️ 0

KETERANGAN	JUMLAH
Naik	16
Tetap	6
Turun	5

Sumber : Open Data Jabar

Jika dilihat dari tabel diatas, salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan paling signifikan adalah Kota Bekasi. Nilai IKD Kota Bekasi mengalami kenaikan sebesar 0,15. Peningkatan ini merupakan kenaikan tertinggi diantara seluruh kabupaten/kota yang terdapat di dalam data.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dari indikator Indeks Ketahanan Daerah karena memiliki target sebesar 0,60 dan realisasi sebesar 0,70, sehingga capaian kinerja mencapai 116,7%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan program yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketahanan daerah. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dukungan kebijakan dan anggaran, serta sinergi lintas sektor.

Maka keberhasilan peningkatan dari nilai IKD diatas tidak terlepas dari faktor indikator yang dilengkapi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 3.4
Indikator Penilaian Indeks Ketahanan Daerah

PRIORITAS	SASARAN		INDIKATOR	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	NILAI RESPON	LEVEL INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI INDIKATOR	INDEKS PRIORITAS
PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	TEMATIK KERUANGAN	27	Penataan ruang berbasis PRB	1	2	4	0,03	0,12	0,93
				1	1				
				1	1				
				0	0				
		28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	1	2	3	0,02	0,06	
				1	1				
	0			0					
	0			0					
	TEMATIK PENDIDIKAN (SMAB)	29	Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	1	2	5	0,05	0,25	
				1	1				
				1	1				
				1	1				
		30	RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	1	2	5	0,05	0,25	
				1	1				
	DESA TANGGUH BENCANA	31	Desa Tangguh Bencana	1	2	5	0,05	0,25	
				1	1				
				1	1				
				1	1				

Sumber : BNPB

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat bahwa indikator penyebab keberhasilan dari penilaian IKD dipengaruhi oleh tingginya capaian pada indikator yang memiliki kepentingan tinggi, khususnya pada sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi lintas sektor, komitmen pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, serta meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pembangunan ketahanan daerah terhadap bencana.

6. Analisis atau efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja sebesar 116,7% menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mendukung peningkatan ketahanan daerah telah dilaksanakan secara efisien dan tepat guna. Output dan outcome yang dihasilkan melebihi target yang direncanakan, sehingga mencerminkan tata kelola program yang baik, perencanaan yang matang, serta optimalisasi anggaran, SDM, dan sarana prasarana secara terintegrasi.

Berdasarkan data eksisting pegawai per tanggal 31 Desember 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi oleh 86 orang pegawai yang terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40 orang PPPK. Jumlah tersebut untuk memberikan layanan kepada seluruh warga Kota Bekasi.

Selain dorongan dari sumber daya manusia, penggunaan anggaran juga cukup berpengaruh atas keberhasilan pencapaian target kinerja. Dalam

pencapaian kinerja penanggulangan bencana BPBD telah memaksimalkan anggaran yang ada untuk pencegahan Masyarakat untuk meminimalisir dampak bencana, seperti sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik. Pemberian bantuan logistic berupa sandang pangan dan papan untuk korban bencana, serta pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD dalam memberikan pengaruh yang cukup banyak keberhasilan pencapaian target kinerja. Berikut analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi :

Tabel 3.11
Capaian Indikator Per Sub Kegiatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	316.676.000	314.974.250	99,46
2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	220.710.600	215.356.420	97,57
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	291.172.000	283.320.240	97,30
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30.000.000	26.400.000	88,00
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan	3.447.067.520	3.274.850.111	95,00

		jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			
4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	230.115.000	219.859.750	95,54
5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	221.882.000	218.938.000	98,67
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	26.133.000	9.625.000	36,83
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	265.400.000	262.315.635	98,84
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
1	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	125.000.000	120.000.000	96,00
RATA-RATA					95,58%

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan membandingkan antara capaian kegiatan sebesar 100% dengan penggunaan sumber daya yang ada/realisasi keuangan sebesar 79,64%. Sehingga keluar nilai efisiensi sumber daya sebesar 23,36%.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sangat ditunjang oleh program mitigasi, kesiapsiagaan, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan efektif dan terintegrasi. Namun demikian, aspek pemulihan pascabencana, konsistensi anggaran, serta kualitas dokumentasi

perlu terus diperkuat agar capaian kinerja tetap stabil dan berkelanjutan pada periode berikutnya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target kinerja tentunya terdapat sumber daya yang digunakan untuk mendukung ketercapaian kinerja, salah satunya adalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2025 sebesar 11.891.999.196 Sedangkan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	(%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.717.843.076	5.350.058.369	79,64
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, Kinerja Perangkat Daerah	23.905.000	11.789.650	49,32
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.791.642.000	3.614.882.485	75,44
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.792.720	219.758.355	86,59
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.959.700	345.249.280	90,39
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.029.000	47.685.000	86,65
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.662.356	492.486.539	87,37
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.852.300	618.207.060	95,42
B	Program Penanggulangan Bencana	5.174.156.120	4.945.639.406	95,58
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	537.386.600	530.330.670	98,69
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	4.220.236.520	4.023.368.101	95,34
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	291.533.000	271.940.635	93,28
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	125.000.000	120.000.000	96,00
TOTAL		11.891.999.196	10.295.697.775	86,58

Sumber : Aplikasi Simpelbang Kota Bekasi 2025

Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi adalah Rp. 10.295.697.775 atau 86.56% dari total pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 11.891.999.196. Untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi diperlukan anggaran sebesar Rp. 5.350.058.369 pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 4.945.639.406 pada Program Penanggulangan Bencana.

Dalam pelaksanaan sub kegiatan, tentunya membutuhkan anggaran. Namun untuk mencapai target output sub kegiatan tidak selalu menghabiskan anggaran yang disediakan. Hal ini disebut dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran pada tahun 2025 terdapat pada 26 sub kegiatan yang masing-masing nilainya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Efisiensi Anggaran Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Fisik	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	37.83	62.17
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	88.70	11.30
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	75.43	24.57
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	90.65	9.35
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	86.59	13.41
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	98.83	1.17
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	90.07	9.93
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	85.97	14.03
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	79.92	20.08
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	94.36	5.64
11	Pengadaan Mebel	100	86.65	13.15
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	56.60	43.40
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	91.71	8.29
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	78.28	21.72
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	100	97.70	2.30

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	97.60	2.40
17	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100	99.46	0.54
18	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100	97.57	2.43
19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100	97.30	2.70
20	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100	88.00	12.00
21	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100	95.00	5.00
22	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100	95.54	4.46
23	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100	98.67	1.33
24	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	36.83	63.17
25	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	98.84	1.16
26	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	100	96.00	4.00

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi tahun 2025

Total anggaran pada 26 sub kegiatan diatas adalah 11.891.999.196 sedangkan total anggaran yang digunakan adalah 10.295.697.775 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 1.596.301.421 atau sebesar 13.42%. Dengan demikian untuk mencapai output 100% pada 26 sub kegiatan diatas, terdapat efisiensi anggaran sebesar 13.42%.

Penyerapan anggaran yang kurang optimal tersebut beberapa diantaranya disebabkan oleh adanya beberapa kendala. Seperti pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, Kinerja Perangkat Daerah realisasi kegiatan hanya 49.32% karena kegiatan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melakukan cetak print secara mandiri. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang berulang, maka pada tahun berikutnya harus dilakukan perbaikan. Pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi anggaran dan tahapan-tahapan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam rencana kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 menjelaskan tentang realisasi dan capaian kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja pada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk Tahun 2025 mencerminkan berbagai pencapaian dan juga tantangan dalam kinerja sasaran strategis yang ditunjukkan oleh instansi tersebut. Hal ini sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2025 yang telah disusun. Diharapkan LKIP ini dapat berfungsi sebagai alat evaluasi dan analisis terhadap kinerja, yang akan mendukung perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, serta memberikan dasar dalam pengembangan kebijakan baru yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan yang ada pada BAB III dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi berhasil dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat dari hampir seluruh target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan kategori sangat baik dan cukup.

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui edukasi dan pengembangan sarana prasarana, serta meningkatkan profesionalitas aparatur dan koordinasi lintas sektor.

Rencana-rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi di masa mendatang yaitu dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat seperti melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat siap tanggap dalam menghadapi bencana dan membangun kelurahan tangguh bencana di tingkat kelurahan. Selanjutnya dengan mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana seperti menyerahkan peralatan perahu karet ke kelurahan untuk mendukung penanganan darurat bencana.

Selain itu dengan meningkatkan profesionalitas aparaturnya dengan mengadakan pelatihan dan insentif dalam penanggulangan bencana.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi kepada pihak terkait tentang pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bekasi, 19 Januari 2026

Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI,



IMAN SETIA GUNAWAN, S.T., M.T

Penata Tk. I/III.d

NIP. 19761014 200604 1 011

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Telp./Fax (021) 2808 8811
BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI**

NOMOR: 100.2.2.3/48/BPBD.Set

TENTANG

TIM PENYUSUN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 melalui Keputusan Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana

telah diubah tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 60 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 32).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 100.2.2.3/1682/BPBD.Set perilhal Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Kota Bekasi tanggal 15 Desember 2025.

Memutuskan

- Menetapkan :
Kesatu : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
- Kedua : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai Tugas:
1. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja;
 2. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 4. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasikan pengukuran dan penilaian kinerja;
 5. mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. melaporkan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 15 Januari 2026

Plt. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bekasi



IMAN SETIA GUNAWAN

Tembusan:

- Yth. 1. Walikota Bekasi
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
3. Inspektorat Kota Bekasi